

BAHASA INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL

A.M.W. PRANARKA

Dalam hubungan bahasa Indonesia dan pengembangan kebudayaan nasional ada empat permasalahan yang akan diperhatikan, yaitu: 1) bagaimana hubungan antara pengembangan bahasa Indonesia dan pengembangan kebudayaan nasional; 2) sejauh manakah bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai sarana pengembangan kebudayaan nasional; 3) bagaimana prospek peranan bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan transformasi kebudayaan ke arah peradaban di Indonesia; 4) usaha-usaha apakah yang diperlukan untuk meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai unsur kebudayaan nasional Indonesia yang hidup.

Tema di atas mempunyai lingkup terbatas, akan tetapi pendalamannya dikaitkan dengan latar belakang yang luas. Bahasa pada umumnya tidak pernah dapat dilepaskan dari 'Sitz im Leben' manusia. Bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik dan sejarah kebudayaan bangsa Indonesia. Konteks sosio politik dan konteks sosio kultural adalah amat penting bagi pengembangan bahasa Indonesia. Sebaliknya perkembangan bahasa Indonesia juga akan mempunyai arti terhadap kehidupan sosio politik dan sosio kultural bangsa kita. Karenanya apa yang akan diuraikan sebagai suatu bahan pemikiran berikut ini adalah apa yang lazim dinamakan *analisa konteks*: khususnya konteks sosio kultural pengembangan Bahasa Indonesia.

PENGANTAR TENTANG KEBUDAYAAN

Uraian ini diawali dengan mengemukakan apa yang pernah diungkapkan oleh Prof. van Baal sebagai berikut: "Cultuur bestaat in de mens; vandaar gaat ze uit." Kalau kata-kata itu kita terjemahkan secara bebas, tanpa

mengurangi apa yang tersirat di dalamnya, maka dapatlah dikatakan bahwa kebudayaan itu awalnya ada pada manusia; dari sana ia memancar.

Konstataasi Prof. van Baal tersebut merupakan salah satu ungkapan dari suatu arus yang amat besar artinya di dalam perkembangan studi dan analisa kebudayaan, sejak sekitar empat puluh tahun yang lalu sampai kepada hari-hari ini.

Ada berbagai fase perkembangan di dalam studi atau pemikiran mengenai kebudayaan itu. Perkembangan pada fase pertama terutama terdiri dari catatan-catatan yang sifatnya deskriptif, dan kebanyakan adalah naskah-naskah itineraria atau catatan perjalanan. Perkembangan pada fase kedua menunjukkan corak yang lebih analitis, tetapi inipun mempunyai evolusinya tersendiri. Pada awalnya banyak dikemukakan analisa atas dasar perbandingan antara kebudayaan Eropa dengan kebudayaan di luar Eropa, masih tidak jauh berbeda dari pola Yunani kuno (di mana ada kategori antara Hellas dan Barbaroi) atau jaman Romawi Kuno (di mana ada kategori Romani dan Gentes). Pada fase itu terdapat dua aliran pokok: teori evolusi dan teori degenerasi. Sesudah itu analisa dan studi kebudayaan kebanyakan merupakan suatu transplantasi cabang-cabang disiplin pengetahuan ke dalam bidang kebudayaan, dan kebanyakan sifatnya deterministik. Lahirlah berbagai macam aliran seperti interpretasi geografis, interpretasi biologis (determinisme ras, determinisme sex), interpretasi pralogis, psikologisme kebudayaan, determinisme ekonomi, interpretasi sejarah (aliran difusionisme, aliran kultur historis) dan interpretasi sosiologis. Tidaklah mengherankan bahwa kemudian terdapat bermacam ragam definisi kebudayaan. Tidak pula mengherankan apabila kemudian terdapat konstataasi sebagai berikut: "Ternyata pikiran ilmiah Barat tidak terlalu membantu kita di dalam memberikan pengertian tentang kebudayaan. Di tahun 1952 Kroeber dan Kluchohn misalnya, menemukan tidak kurang dari 166 definisi mengenai kebudayaan selama kurun waktu 1871-1952, yang diajukan oleh para antropolog, sosiolog, psikolog, dan lain-lain ilmu sosial, bahkan ahli kimia, biologi dan falsafah. Setiap ilmiawan ini menyatakan batasan pengertiannya sendiri, tekanan arti sendiri dan kadang kala meliputi berbagai isu yang bertentangan satu dengan lainnya. Para ahli antropologi yang biasanya gemar mengajukan konsep ilmiah tentang kebudayaan juga mengajukan pengertian yang terlalu polysemik, sesuai dengan penggunaan istilah kebudayaan di dalam analisa permasalahan yang beraneka ragam, misalnya: akulturasi, keanekaragaman kebudayaan, kontak kebudayaan, pola kebudayaan dan lain-lain. Diversitas pengertian kebudayaan dewasa ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga kebudayaan telah kehilangan ketepatan pengertian seperti yang pernah dialaminya di masa lampau sehingga menjadi kabur untuk dipegang. Ini pulalah kiranya yang menjadi sebab utama dari kesulitan di dalam usaha merumuskan sesuatu kebi-

jakan (policy) kebudayaan; sebab bagaimana menerapkan sesuatu kebijakan di satu bidang yang sulit dirumuskan secara 'tepat' dahulu?"¹

Perkembangan yang demikian itu merupakan akibat dari sejarah kebudayaan modern sendiri, yang memang menunjukkan suatu perkembangan yang amat kaya, penuh dengan macam-macam kemungkinan, akan tetapi semakin kehilangan sintese. Heterogenitas pendekatan maupun diversitas definisi mengenai kebudayaan yang kebanyakan bersifat dogmatik dan deterministik, mengungkapkan kompleksitas dari apa yang dinamakan kebudayaan itu; namun demikian pandangan-pandangan telah dipersempit oleh fanatisme cabang-cabang disiplin ilmu pengetahuan sehingga menutup cakrawala ke arah titik-titik komunikasi dan sintese. Pemikiran mengenai kebudayaan yang berkembang terpecah-pecah di dalam keping-keping aliran yang fanatik dan tertutup satu sama lain itu, tampaknya membangkitkan adanya suatu gerakan kritis, terutama untuk membuka jalan-jalan menuju kepada titik-titik sintese, kepada komunikasi antar disiplin, maka lahirlah antara lain aliran akulturasi dan aliran antropologi budaya, yang pada pokoknya menempatkan manusia sebagai konteks dasar dari apa yang dinamakan kebudayaan. Inilah arus baru di dalam perkembangan studi dan analisa kebudayaan, yang berkembang di sekitar pertengahan abad kedua puluh ini dan besar pengaruhnya sampai pada saat ini.

Proses yang demikian ini merupakan refleksi dari gerakan sejarah yang lebih besar dan lebih luas lagi: manusia mulai mengalami gejala titik jenuh perkembangan sejarah modern. Menyadari kompleksitas tetapi serta merta mencari titik sintese, menghilangkan sikap-sikap sempit dari fanatisme, determinisme dan dogmatisme, mengembangkan pola berpikir yang tidak terkeping-keping melainkan secara lapang, dan menempatkan manusia menjadi konteks dasar dari segala permasalahan maupun pengalaman sejarah, kiranya merupakan arus kuat di dalam alam kontemporer dewasa ini. Sejarah modern yang kaya itu ternyata telah memecah-mecah manusia ini sendiri; kalau Nietzsche pernah memproklamasikan 'the death of God' maka perkembangan modern mencanangkan pula tanda 'the death of man'. Situasi ini mengakibatkan adanya kebangkitan baru yang berpangkal pada kesadaran manusia akan dirinya, sehingga terdapat gejala 'the resurrection of man', bangkitnya kemanusiaan.

Antropologi dan humanisme merupakan istilah-istilah kunci di dalam alam pikiran kontemporer. "A new humanism ought to be established. It must have the power to renew. It ought to evolve within history; unless it has the

1 Daed Joesoef, "Era Pengembangan Kebudayaan dan Kaitannya dengan Pendidikan", *Analisa* (Jakarta: CSIS, 1978) No. 5

power to renew, it is nothing," demikian tulis Jacques Maritain,¹ seorang filsuf dan diplomat Perancis menanggapi perkembangan sejarah modern yang dirasanya menjadi semakin gawat. Situasi ini dengan sendirinya membawa kebudayaan menjadi fokus yang semakin penting. Kebangkitan kemanusiaan (the resurrection of man) tidak lain adalah ditemukannya kembali arti kebudayaan (the rediscovery of culture). Orang melihat kebudayaan sebagai suatu jalan dan tumpuan harapan di dalam krisis-krisis besar dunia dewasa ini. Kebudayaan dipandang sebagai suatu proses humanisasi untuk menghindarkan perkembangan sejarah dari dehumanisasi. Kebudayaan merupakan jalan-jalan setapak yang secara terus-menerus harus dilewati umat manusia. Manusia baik secara individual maupun secara kolektif mengidap suatu tegangan eksistensial, tegangan antara humanisasi dan dehumanisasi. Beban tegangan eksistensial ini hanya dapat diatasi apabila kebudayaan oleh manusia dijadikan pilihan yang jelas dan sadar.

Dalam keadaan demikian refleksi dan analisa antropologis, (tidak sekedar dalam pengertian antropologi budaya, melainkan dalam arti studi kemanusiaan, humaniora, humanities) tentu saja menjadi penting sekali artinya. "Was ist der Mensch und was ist seine Stellung im All," — apakah manusia itu dan apakah posisi dia di dalam semesta? Kalau permasalahan Max Scheler ini kita pandang sebagai suatu ungkapan seorang fenomenolog dan seorang eksistensialis yang sungguh-sungguh, maka permasalahan tersebut bukanlah sekedar permasalahan falsafah, tetapi ia terutama adalah permasalahan kultural. Jawaban kepada pertanyaan Max Scheler ini tidak lain daripada menjadikan kebudayaan sebagai pilihan: menjadikan manusia titik sintese dari kompleksitas permasalahan hidup dan sejarah.

Tempat manusia di dalam evolusi — atau lebih tepat koevolusi semesta itu makin lama terasa makin menjadi jelas. Manusia bukanlah sekedar satu gejala kosmis, tetapi ia terutama adalah kekuatan kultural. Sejarah dunia mulai berubah menjadi sejarah kebudayaan semenjak manusia menggejala di dunia. Ada tiga fase di dalam koevolusi semesta itu, yang berlangsung di dalam suatu kesinambungan sejarah: fase kosmogenezis (terjadinya kosmos), fase biogenezis (terjadinya kehidupan) dan fase noogenezis (fase terjadinya manusia, fase kebudayaan). Kita sekarang berada di dalam fase ketiga, fase noogenezis, fase kebudayaan. Fase ini terjadi semenjak manusia mulai menggejala di dunia. Amat menarik perhatian bahwa istilah noogenezis itu diangkat dari kata Yunani nous dan genesis dan kata nous tersebut amatlah berdekatan artinya dengan istilah budi di dalam bahasa kita.

1 J. Maritain, *True Humanism*, London (1939). J. Maritain, *Principes d'une Politique Humaniste*, Paris (1945)

Bukanlah maksud kami mengemukakan suatu uraian mengenai falsafah manusia, namun demikian berkembangnya suatu kebudayaan akan sangat memerlukan adanya pemahaman secara sadar mengenai struktur ontologi manusia. Secara eksplisit ataupun secara implisit pemahaman mengenai struktur ontologi manusia dan bahkan struktur ontologi semesta amat besar pengaruhnya kepada perkembangan, corak dan bentuk kebudayaan itu. Karena itu adanya suatu falsafah manusia yang terjalin dengan suatu falsafah tentang dunia yang refleksif, sadar, sistematis dan kritis akan merupakan salah satu landasan pengembangan kebudayaan.

Tampaknya sudah menjadi semacam konsensus di dalam antropologi falsafah bahwa pada hidup manusia ini secara inheren diakui terdapatnya apa yang dinamakan tegangan eksistensial: antara personalitas dan sosialitas, antara dinamika dan keterbatasan, antara lahiriah dan batiniah, antara dimensi horisontal dan vertikal. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk mengungkapkan struktur dasar ontologi hidup manusia, serta dengan mengatasi kepinangan dan kesempitan bermacam-macam falsafah tentang manusia. Rumusan struktur ontologi manusia yang demikian itu di dasarkan atas interpretasi pengalaman hidup manusia sebagai suatu kemanunggalan antara yang jasmani dan rohani, yang bergerak di dalam ruang dan waktu, di dalam dimensi relasional secara horisontal (dengan alam sekitar dan sesama manusia) maupun secara vertikal (dengan Yang Tiada Batas). *Geist-im Welt, in der Welt Sein, das Leben des Mit-sein, Geschichlichkeit*, komunikasi, komitmen, merupakan istilah-istilah kunci di dalam antropologi falsafah dewasa ini, dan memang mengungkapkan pengalaman dasar kehidupan kita. Pengalaman itu mengungkapkan bahwa manusia adalah pribadi, yang berada di dunia, berada di dalam masyarakat, berada di dalam sejarah, bergerak menembus keterbatasan-keterbatasan. Kehidupan adalah suatu proses aktif, karena itu dapat dikatakan bahwa manusia adalah mempribadi, memasyarakat, menyejarah. Itu semua adalah proses humanisasi, proses sosialisasi, proses kebudayaan. Manusia membudayakan dirinya, membudayakan masyarakatnya, membudayakan alamnya.

Beban eksistensial yang ada di dalam struktur ontologi manusia membawa akibat bahwa manusia, baik secara individual maupun secara kolektif, akan selalu berhadapan dengan simpang sejarah. "De mens kan steeds twee kanten uit: zichzelf vernietigen ofwel ziech zelf vervolmaken."¹ Manusia selalu dapat memilih dua jalur eksistensi: jalur humanisasi atau jalur dehumanisasi. Jalur humanisasi adalah kebudayaan. Maka kebudayaan akan selalu berarti *pilihan eksistensi*, pilihan eksistensi manusia. Kebudayaan adalah dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia.

1 F.Sassen, *Wijsbegeerte van Onze Tijd*, Amsterdam (1957)

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kultural tersebut, manusia mempunyai bekal-bekal perlengkapan, yang berupa daya-daya kehidupannya. Ada daya-daya fisik biologis, ada daya-daya kognitif, volitif, psikis dan ada daya-daya relasional. Dengan daya-daya tersebut manusia membudaya, baik secara pribadi maupun secara bersama. Karenanya kebudayaan meliputi aspek-aspek logika, estetika dan etika di dalam perkembangan manusia, dan ditinjau sebagai satu proses masyarakat, maka peranan pengetahuan dan komunikasi mempunyai arti yang amat besar. Dengan pengetahuan manusia memperoleh perbendaharaan dari hal-hal yang diketahui mengenai masa lampau dan masa kini, mengenai apa-apa yang pernah diciptakan dan yang sedang dalam proses penciptaan. Berkat pengetahuan manusia dibantu untuk memahami dengan baik dirinya sendiri, hubungannya dengan manusia-manusia lainnya, hubungannya dengan alam di lingkungan hidupnya, dan kaitan kegiatannya dengan kegiatan warga masyarakat lainnya. Dengan praktek komunikasi dipenuhilah kebutuhan manusia untuk mendapat informasi mengenai perkembangan keadaan yang semakin kompleks dan berhubungan pada waktu yang bersamaan ada pula kebutuhan dari anggota masyarakat untuk membagi pengetahuannya kepada anggota masyarakat lainnya, untuk memberitahu apa-apa yang dipikirkannya kepada pihak lain. Masyarakat sebagai keseluruhan, demi perkembangan yang sehat dan teratur, memang diperlukan anggota-anggota yang tidak hanya kreatif, tetapi juga mampu berkomunikasi secara korek, teratur, diajukan secara jelas dan eksplisit serta tercatat.¹

Apabila kebudayaan harus menjadi pilihan eksistensi manusia, apabila kebudayaan adalah jalan-jalan setapak yang manusia secara terus-menerus harus melewatinya, maka hanya konsep kebudayaan yang lapang dan dinamis yang akan memungkinkan manusia memberikan jawaban-jawaban kepada masalah-masalah hidup dan sejarah yang semakin kompleks sifatnya.

Arus yang demikian tadi tampaknya telah pula ikut mewarnai perkembangan di Indonesia, sekurang-kurangnya sekitar sepuluh tahun terakhir ini. Hal ini mungkin disebabkan karena tradisi humanistik ternyata cukup kuat di dalam alam budaya Indonesia; tetapi bagaimanapun juga kita, sebagai bagian dari sejarah besar umat manusia, tidak dapat melarikan diri dari pengalaman-pengalaman besar di dalamnya. Hanya saja, di dalam menghadapi permasalahan tersebut, beberapa tahun yang lalu itu kita belum juga sampai kepada pilihan-pilihan yang tegas. Terasa cukup sukar untuk sampai kepada suatu politik kebudayaan yang sadar dan jelas. Hal tersebut antara lain mungkin disebabkan oleh pengaruh perkembangan pengertian kebudayaan, sehingga di dalam usaha mendalami permasalahan kebudayaan tidak jarang

1 Lihat Daed Joesoef, *op. cit.*

kita terperangkap kepada suasana permainan kata-kata. Hal tersebut mungkin pula memang disebabkan oleh situasi kultural kita dewasa ini, sebagai suatu situasi transisional, di mana menentukan pilihan-pilihan dalam menghadapi kompleksitas permasalahan memang harus terjadi, dan memerlukan waktu. Mungkin kebanyakan dari kita masih ingat betapa beberapa waktu yang lalu kita dilibatkan dengan kontroversi serta distingsi yang agak bertele-tele mengenai kebudayaan dengan "K" (k besar) dan kebudayaan dengan "k" (k kecil).

"Pendidikan merupakan bagian yang integral dari kebudayaan, sama halnya dengan tulisan merupakan bagian yang integral dari teknologi. Hal ini berarti bahwa pendidikan adalah cara yang dipakai untuk meneruskan nilai-nilai kebudayaan dari satu generasi ke generasi lainnya sedangkan kebudayaan merupakan sekaligus semangat yang menjwai pendidikan dan kerangka di mana diletakkan setiap pemikiran dan perbuatan di bidang pendidikan," demikianlah diucapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Hari Pendidikan Nasional di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1978. Tidaklah mengherankan bahwa policy statement Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mendapat sambutan yang lega. Pernyataan tersebut menciptakan suatu suasana baru di mana kebijakan kebudayaan nasional yang jelas dan sadar telah menjadi suatu pilihan, sekurang-kurangnya secara konsepsional. Policy statement itu telah memberi warna kepada perkembangan kehidupan masyarakat, dan tentunya menjadi arah aksi kebudayaan.

BAHASA DAN KEBUDAYAAN

Pada tempatnyalah sekarang dimulai suatu ulasan mengenai hubungan antara bahasa dengan kebudayaan. Tidak jarang dikemukakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi, dan karena komunikasi merupakan bagian penting di dalam kebudayaan, maka bahasa pun mempunyai arti yang penting di dalam kebudayaan itu pula. Tidak jarang dikemukakan bahwa bahasa adalah sarana di dalam kebudayaan. Pernyataan-pernyataan itu tidak salah, hanya saja tampaknya kurang tepat. Memang betul bahasa adalah sarana, namun demikian ia berbeda dengan sebuah batu yang juga dapat menjadi sarana bagi kita, ataupun sebuah pisau yang dapat juga menjadi suatu sarana.

Lebih dari sekedar sarana (ataupun kalau ia dinamakan sarana, haruslah dalam arti yang istimewa) bahasa adalah manifestasi manusiawi par-excellence, bahasa adalah ekspresi manusiawi. Di dalam bahasa tercerminlah seluruh aspek ontologi manusia. Di dalam bahasa tercerminlah tegangan eksistensial, tercerminlah dialektika antara rohani dan jasmani, personalitas dan sosialitas, dinamik dan keterbatasan. Bahasa adalah sesuatu yang amat

dekat, bahkan melekat pada struktur dasar manusia ini sendiri. Karena itu bahasa merupakan bagian yang amat khusus dari suatu kebudayaan. Kalau hidup manusia bagaikan api yang menyala, kebudayaan adalah panasnya dan bahasa adalah nyalanya.

Itulah sebabnya maka analisa bahasa telah mempunyai perkembangan yang amat khusus. Semula analisa bahasa adalah bagian dari aliran positivisme, namun perkembangan selanjutnya justru merupakan suatu kritik terhadap positivisme tersebut. Dewasa ini analisa bahasa - seperti misalnya tampak di dalam perkembangan epistemologi dan hermenetika - merupakan salah satu cabang pengetahuan manusia yang amat penting. Language analysis tampaknya akan mempunyai tempat yang semakin penting di dalam perkembangan ilmu kemanusiaan. Language analysis tampaknya akan berkembang sejajar, kalau tidak lebih jauh, dari system analysis. Sebab, kalau manusia adalah akar dari segala permasalahan sejarah ini, tidak bisa tidak kita harus mempelajari akar itu sendiri. Dan bahasa merupakan jembatan yang paling baik untuk dapat menyelami manusia itu.

Perkembangan hidup manusia, dan karena itu juga perkembangan kebudayaan, akan selalu membawa serta aspek semantis, aspek ontologis, aspek deontologis dan aspek epistemologis. Aspek-aspek ini satu sama lain amatlah berkaitan. Oleh karena bahasa itu adalah suatu manifestasi manusiawi, suatu ekspresi manusiawi, maka bahasa tidaklah sekedar termasuk ke dalam aspek semantis; ia juga terjalin dengan aspek ontologis, aspek deontologis dan aspek epistemologis. Maka itu bahasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kebudayaan, baik kebudayaan itu kita pandang sebagai pilihan eksistensi, baik itu menyangkut proses pengetahuan dan komunikasi, maupun kalau kebudayaan itu kita pandang berkenaan dengan perkembangan logika, estetika dan etika.

Apakah ini artinya? Sebagaimana kita tidak dapat mendalami kebudayaan secara sepotong-sepotong, demikianpun halnya dengan masalah bahasa. Bahasa bukanlah sekedar masalah semantik. Ia adalah masalah logika dan masalah lain-lainnya lagi. Bahasa berhimpit pada induknya, yaitu manusia dan kebudayaan. Ini berarti bahwa segala usaha pengembangan bahasa kita, juga tidak dapat dilihat secara sepotong-sepotong, apalagi tanpa memperhatikan konteks utamanya: sejarah bangsa ini, terutama sejarah kebudayaannya, baik masa lampau, kini dan perkembangannya, maupun dinamik intinya yang amat esensial. Mengembangkan bahasa nasional berarti mengembangkan kebudayaan nasional. Ini harus berarti bahwa kebudayaan nasional bagi kita memang telah menjadi satu pilihan eksistensi.

Apa yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 tampaknya memang meru-

pakan contoh yang amat bagus dari kenyataan itu. Konteks politik nasional, konteks budaya nasional dan bahasa nasional, berpadu. Pada saat itu terjadi pilihan eksistensi kebudayaan nasional, terjadi pilihan politik nasional, terjadi pilihan bahasa nasional. Ditegaskannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bersamaan jatuhnya dengan pilihan akan politik nasional, pilihan akan kebudayaan nasional. Kebudayaan adalah induk radikal dari segala macam manifestasi kegiatan hidup manusia, termasuk bahasa dan politik. Maka dapatlah dikatakan bahwa perkembangan bahasa Indonesia serta dengan perkembangan negara kesatuan dan kebangsaan Indonesia pada hakekatnya adalah buah dan ungkapan dari dinamika kebudayaan nasional. Dalam pengertian inilah kita dapat berbicara mengenai nasionalisme dalam arti kultur 1.

Sudah banyak diusahakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengembangkan bahasa Indonesia. Ejaan baru, peristilahan, pembakuan, penentuan kaidah-kaidah, semuanya sedang di dalam proses penggarapan. Tidak jarang kita merasakan adanya hambatan-hambatan. Dan kadang-kadang permasalahannya ingin kita pecahkan melulu melalui penertiban-penertiban di bidang kebahasaan saja. Dengan menyadari betapa erat kaitan yang ada antara bahasa nasional dengan kebudayaan nasional ini, sekurang-kurangnya kita perlu melihat lingkup persoalannya secara lebih luas. Walaupun ungkapan permasalahan itu terdapat di bidang bahasa, tidakkah akarnya kadang-kadang harus kita temukan di dalam perkembangan kebudayaan nasional ini sendiri: di dalam sikap terhadap kebudayaan nasional itu, di dalam persepsi kita mengenai hal itu, di dalam permasalahan-permasalahan yang ada di dalam perkembangan kebudayaan nasional itu. Pengembangan bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia secara baik, tepat dan cermat, tentu akan ada impaknya terhadap perkembangan kebudayaan nasional secara luas. Tetapi sebaliknya situasi kultural bangsa ini sendiri akan mempengaruhi pula pengembangan bahasa Indonesia itu. Politik bahasa nasional akan besar artinya terhadap politik kebudayaan nasional. Sebaliknya politik kebudayaan itu akan menentukan pula perkembangan politik bahasa. Sebab keduanya adalah bagaikan panas api dan nyalanya. Karenanya jelas apabila ingin diletakkan basis-basis yang kukuh di dalam politik bahasa nasional, di samping itu juga basis-basis kukuh dan sadar bagi politik kebudayaan nasional.

Ada dua contoh yang mungkin dapat kami ajukan. Pertama: di dalam pengembangan penggunaan bahasa terutama yang tertulis kita menginginkan adanya *accuracy*, *precision* dan karena itu perlu *discipline*. Hambatannya banyak. Pengalaman dari lapangan pendidikan formal tidak jarang mendatangkan rasa kecewa. Tetapi tidakkah itu semua justru permasalahan pokok di dalam kebudayaan kita? Tidakkah *accuracy*, *precision* dan *discipline* tersebut merupakan unsur-unsur yang sedang harus kita tanamkan di dalam

kehidupan budaya kita?

Contoh lain adalah: masalah bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing. Bagaimana sikap kita? Bagaimana ditentukan? Kami rasa alternatif-alternatif apapun yang kita pilih harus selalu di dasarkan atas situasi kultural kita. Bahasa daerah harus kita pandang sebagai bagian dari perkembangan manusiawi. Tetapi sementara itu kita harus melihat pula bahwa manusia Indonesia ini terlibat dengan berputarnya tiga roda sistem-sistem yang berjalan berkaitan satu dengan yang lain: sistem nasional, sistem regional, sistem global.

Tentang hal-hal ini kiranya nanti masih perlu kita bahas sekali lagi. Tetapi baiklah kita menengok sebentar situasi kultural kita dewasa ini dan apa implikasinya pada masalah pengembangan bahasa Indonesia.

SITUASI KULTURAL KITA SAAT INI

Bagaimanakah situasi kultural kita saat ini? Ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan terlebih dahulu. Pertama adalah bahwa kebudayaan itu selalu berada di dalam status dinamis: ia berkembang terus. Kedua, kiranya ada baiknya kalau mulai saat ini analisa kita mengenai kebudayaan nasional tidak terlalu introvert lagi, tetapi lebih bercorak ekstrovert. Kita perlu menempatkan kebudayaan nasional di dalam konteks perkembangan regional dan mondial - karena di situlah kancah masa depan bangsa kita.

Secara kultural kita terlibat di dalam suatu situasi transformasi yang besar, pesat dan menyeluruh. Besar karena ia terjadi secara serentak di hampir segala penjuru dunia. Pesat karena ia terjadi di dalam tempo yang kadang-kadang tak terkendali. Menyeluruh, karena ia menyangkut hampir segala bidang kehidupan: pengetahuan, ekonomi, teknologi, politik, bahasa, kesenian dan religi. Transformasi itu adalah transformasi kultural, karena manusia adalah awal dan tujuan, sebab dan penderita dari situasi tersebut.

Proses transformasi yang demikian itu terjadi di dalam kenyataan yang serba jalin-menjalin, di dalam interrelasi dan interdependensi. Semua ini telah melahirkan apa yang dinamakan dalil kompleksitas, di mana kerap kali menimbulkan rasa insekuriti dan ketidakpastian.

Hal tersebut adalah gejala-gejala yang kita alami semua. Kita terlibat di dalam sejarah yang makin lama semakin kompleks: kompleksitas permasalahan-

an pribadi, kelompok, kompleksitas permasalahan nasional, kompleksitas permasalahan internasional dan regional.

Dalil kompleksitas itu harus dihadapi dengan dalil "centricitas": kita harus mampu membangun titik-titik sintese. Sintese nasional, sintese internasional dan sintese regional. Dialektika antara kompleksitas dan sintese adalah kerangka yang penting di dalam usaha memahami situasi kultural kita.

Transformasi, kompleksitas dan sintese adalah opgave kultural dunia dewasa ini. Dan situasi ini hanya dapat kita hadapi apabila kita mampu mentransformasi proses kebudayaan menjadi peradaban. Artinya: di dalam perkembangan kebudayaan kita harus ciptakan peradaban. Sebab opgave kultural hanya akan dapat diselesaikan dengan peradaban sebagai kekuatan.

Ada tiga elemen pokok dari peradaban itu: penggunaan tulisan, pembagian kerja yang menjurus ke arah perkembangan spesialisasi profesional dan pertumbuhan kota sebagai tempat pemukiman manusia. Pada dasarnya hal ini berkenaan dengan teknologi, pengetahuan, organisasi dan ekonomi.

Elemen-elemen peradaban itu untuk perkembangan masyarakat Indonesia merupakan bidang-bidang yang amat urgen, terutama karena kita saat ini sedang berada di dalam fase akulturasi ketiga. Hipotesa akulturasi ketiga ini mengandaikan adanya fase akulturasi kedua dan akulturasi pertama, serta mengandaikan adanya masyarakat dan kebudayaan nusantara awal, yang sudah mulai terbentuk sebelum terjadi fase akulturasi pertama dan kedua. Yang kami maksud dengan fase akulturasi pertama adalah akulturasi elemen-elemen kebudayaan Hindu ke dalam kebudayaan Indonesia; fase akulturasi kedua adalah akulturasi Islam ke dalam kebudayaan Indonesia.

Adapun fase akulturasi ketiga adalah akulturasi elemen-elemen kebudayaan modern ke dalam kebudayaan Indonesia. Kalau di dalam fase akulturasi pertama dan kedua perubahan-perubahan/transformatasi telah terjadi di dalam bidang bahasa, kesenian, politik dan religi, maka di dalam fase akulturasi ketiga perhatian harus lebih banyak di arahkan kepada transformasi pengetahuan, teknologi dan ekonomi - yang tentu saja akan membawa efek-efek terhadap bidang-bidang lainnya pula seperti bahasa, kesenian, politik dan religi.

Fase akulturasi ketiga, sebagai opgave kultural, hanya akan dapat kita hadapi dengan dikembangkan, dihayati dan dilaksanakannya disiplin, kerja keras, rasionalitas, ketepatan, ketelitian. Sekali lagi: kerja keras, disiplin, precision dan accuracy, sebagai perangkat peradaban baru yang kita perlukan. Kalau tidak, kita akan ditenggelamkan oleh tantangan sejarah. Kita akan

tergilas oleh roda sejarah dunia.

Di sinilah menjadi jelas kaitan antara pengembangan bahasa dengan masalah transformasi kebudayaan ke arah peradaban. Pengembangan bahasa Indonesia, di dalam konteks kultural dewasa ini, harus di tempatkan ke dalam kerangka fase akulturasi ketiga sebagai opgave kultural. Di sinilah pentingnya apa yang dinamakan pembinaan bahasa matematika, di mana tekanan utama adalah di dalam discipline, accuracy dan precision.

"Dengan bahasa matematika saya maksudkan bukanlah bahasa universal dari (ilmu) matematika, tetapi suatu bahasa yang kata-katanya mempunyai pengertian ataupun konsep yang jelas dan eksplisit. Bahasa Indonesia sebagai bahasa modern mungkin memerlukan pengertian dan definisi baru untuk berbagai macam ungkapan dan konsep yang selama ini dikenal dalam kata-kata yang diambil dari bahasa daerah. Mungkin masalahnya di sini bukan hanya terbatas pada konsep-konsep yang terjelma dalam kata-kata, tetapi juga menyangkut aturan pembentukan kata-kata dan jalan serta susunan kalimat, sebab kata-kata itu musti tersusun dalam jalan pikiran yang berbeda dari jalan pikiran dalam kebudayaan tradisional. Betapa tidak. Bahasa daerah sebagai lanjutan suasana kebudayaan tradisional lebih banyak dikuasai oleh naluri, fantasi, mythe dan perasaan sedangkan suasana kebudayaan yang sedang berkembang ke arah peradaban lebih banyak dikuasai oleh rasio, inisiatif, perhitungan dan karenanya, ketepatan. Jadi bahasa matematika perlu untuk mengukur kekuatan dan ketepatan penalaran, kepastian ucapan dan pernyataan. Betapa diperlukannya bahasa seperti ini di dalam politik dan di kalangan orang-orang yang menduduki teknostruktur sosio politik. Untuk keperluan ini mungkin usaha penyusunan kamus istilah perlu ditingkatkan dan penyebarannya perlu semakin diperluas."¹

Penggunaan bahasa Indonesia secara baik, tepat dan bertanggung jawab tampaknya merupakan salah satu tujuan pengembangan bahasa Indonesia saat ini. Pilihan arah ini kiranya memang tepat.

Tanggung jawab! Hal ini termasuk hal yang esensial. Dan karena elemen tanggung jawab tersebut salah satunya adalah tanggung jawab intelektual, maka pada kesempatan ini kami ingin mengemukakan suatu hal yang belum banyak ditangani di Indonesia ini. Di muka kami kemukakan adanya empat aspek kebudayaan: aspek semantis, aspek ontologis, aspek deontologis dan aspek epistemologis. Aspek semantis berkenaan dengan struktur bahasa. Aspek ontologis meliputi konstruksi kita mengenai realita, mengenai manusia, dunia, sejarah, Tuhan. Aspek deontologis berkenaan dengan kaidah-kaidah.

1 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pidato pengarah kepada panitia pengarah Kongres Bahasa Indonesia ke-3

Sedang aspek epistemologis merupakan pertanggung jawaban intelektual mengenai pengetahuan kita berkenaan dengan aspek semantis, ontologis maupun deontologis.

Aspek semantis, ontologis dan deontologis sudah cukup berkembang dan mendapatkan banyak perhatian. Aspek epistemologis masih merupakan *terra incognita* bagi kebanyakan kita. Padahal perkembangan epistemologi secara sadar dan refleksif akan amat mendewasakan perkembangan kebudayaan, terutama karena ada tuntutan secara sadar untuk selalu mempertanggung jawabkan apa yang kita pikirkan, kita katakan, kita pilih dan kita lakukan.

Tanggung jawab, precision, accuracy, disiplin dan kerja keras, adalah ciri-ciri kebudayaan Indonesia di masa mendatang. Hanya dengan penghayatan ciri-ciri itulah, di samping persatuan dan kesatuan nasional, akan terwujud suatu ketahanan kultural untuk menghadapi perputaran roda sejarah dunia.

Agar hal tersebut dapat dicapai, maka pendidikan harus amat memperhatikan berkembangnya ciri-ciri itu. Belajar dan berlatih secara sadar menggunakan bahasa Indonesia secara baik, tepat dan bertanggung jawab jelas mempunyai nilai edukatif yang besar artinya untuk masa depan tersebut.

Tetapi di sinipun berlaku perumpamaan tentang panas api dan nyalanya: politik bahasa yang meminta adanya disiplin, ketepatan dan ketelitian akan meminta adanya politik kebudayaan di mana disiplin, ketepatan, ketelitian dan kerja keras merupakan nilai-nilai yang amat ditekankan - tentu saja jangan sampai mengakibatkan efek-efek yang menjurus ke arah dehumanisasi.

BEBERAPA MASALAH KHUSUS

Sesudah mencoba mendalami arti kebudayaan, sesudah mengulas hubungan antara bahasa dan kebudayaan, dan sesudah membahas peranan bahasa di dalam transformasi kebudayaan dengan implikasinya pada ketahanan kebudayaan maupun proses pendidikan, ada tiga masalah khusus yang kiranya perlu diperhatikan, tanpa lepas dari konteks dasarnya, yaitu:

1. Masalah bahasa daerah;
2. Masalah bahasa nasional;
3. Masalah bahasa asing.

Eratnya hubungan antara kebudayaan dan bahasa membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa bahasa adalah pintu untuk perkembangan eksistensial seorang manusia dan sekelompok manusia. Lewat pintu itu ia mengenal

dan juga dikenal lingkungan eksistensinya. Dalam hal ini perlu sekali kita memberi perhatian kepada apa yang dikemukakan oleh de Saussure, yaitu perbedaan antara parole, langue dan language: antara bahasa percakapan, bahasa peradaban dan bahasa sebagai obyek ilmu pengetahuan. Yang lebih penting tampaknya adalah mengaitkan tiga macam distingsi tersebut dengan evolusi eksistensi manusia sendiri.

Kita tahu bahwa seorang anak manusia lahir. Ia ada karena Tuhan menghendaki dan karena perbuatan orang tua (orang dewasa). Yang ingin kami kemukakan adalah bahwa pada kelahiran ini apa yang dinamakan pilihan eksistensi itu praktis tidak ada. Jadi di dalam awal perkembangan hidup manusia, eksistensi itu diberikan, dan kadar kebudayaan masih pada suatu fase permulaan, yang sifatnya amat tergantung kepada lingkungan hidup. Eksistensi ini akan makin berkembang, pilihan eksistensi menjadi semakin sadar, kadar kebudayaan menjadi berkembang pula.

Bahasa daerah harus diberi arti berdasarkan hubungannya dengan level eksistensi awal tersebut. Bahasa daerah adalah bahasa kelahiran, bahasa yang akan ikut membentuk evolusi awal eksistensi seorang manusia. Inilah fungsi pertama-tama dari bahasa daerah. Ia akan ikut meletakkan dasar-dasar kepribadian. Maka itu bahasa daerah pertama-tama adalah bahasa keluarga.

Bahasa Indonesia adalah bahasa dalam level pilihan eksistensi yang sudah lebih sadar. Ia adalah bahasa kebudayaan nasional - mungkin lebih tepat: bahasa peradaban dalam rangka kebudayaan. Ia diperlukan, dan bahkan menjadi keharusan, di dalam level pilihan eksistensi manusia Indonesia. Dengan perkataan lain bahasa Indonesia diperlukan dalam perkembangan pembudayaan manusia Indonesia, baik individual maupun kolektif. Maka itu hal ini lebih diperhatikan di dalam sistem pendidikan nasional, sebab ia adalah sarana penting bagi transformasi diri manusia Indonesia dan juga masyarakat Indonesia.

Dengan melihat bahasa daerah dan bahasa Indonesia di dalam konteks evolusi eksistensi manusia tersebut, maka proporsinya dapat dijelaskan, dan atas dasar itu dapat ditata paket-paket penanganannya.

Mungkin dalam hal hubungan antara bahasa daerah dengan bahasa Indonesia dapat dikemukakan catatan lain. Pertama, bahwa di dalam proses pembudayaan itu bahasa daerah mempunyai fungsi mengantar ke arah perkembangan kebudayaan nasional. Kedua, bahwa bahasa daerahpun juga mempunyai nilai-nilai khas, merupakan manifestasi dari suatu sistem kebudayaan pula, sehingga ia menjadi bagian yang memperkaya kebudayaan Indonesia yang bersifat nusantara dan bhinneka tunggal ika ini. Yang terakhir ini

penanganannya terletak di dalam pilihan kebijakan kebudayaan yang lebih sadar. Tetapi bagaimanapun, arti terpenting dari bahasa daerah, sebagai bahasa kelahiran, adalah fungsinya di dalam evolusi awal eksistensi manusia. Memang bisa terjadi, disebabkan oleh lingkungan perkembangan kebudayaan dan terutama peradaban, bahwa bahasa Indonesia sudah pula menjadi bahasa dari fase eksistensi awal tersebut.

"Bahasa kelahiran untuk sebagian besar, walaupun tidak terbesar, anak Indonesia, berupa bahasa daerah. Sebagai bahasa ia adalah alat pemikiran, penangkapan (persepsi), perhubungan dan pengucapan (ekspresi) yang terbaik dalam lingkungan kebudayaan dan masyarakat yang menggunakan dan memiliki bahasa itu. Dikatakan terbaik karena ia dapat membantu individu yang menghayatinya di dalam memupuk spontanitas dan kehalusan jiwa (spirit) dan di dalam hal pengenalan (eksplorasi) dari makhluk dan benda. Di pihak lain, ia tetap mempunyai kepentingan kebudayaan yang pantas dikembangkan, dalam arti ia merupakan satu penjelmaan yang khas dari suatu sistem nilai (kebudayaan) yang khas. Namun harga dan kepentingan kebudayaan dari bahasa daerah (kelahiran) ini bukanlah terletak pada sifatnya yang khas, bukan pula pada tradisi dan partikularisme yang dinyatakannya, melainkan pada nilai-nilai manusiawi yang dikandungnya, pada arti sumbangan yang dapat diberikannya untuk pembentukan bahasa Indonesia, untuk memperkaya perbendaharaan kebudayaan nasional dan mondial. Maka berkaitan dengan semua ini masalahnya lalu berupa intensitas pengajarannya di dalam sistem pendidikan formal di samping penelitian dan pencatatan yang pantas dilakukan agar ia tidak punah dilanda arus bahasa persatuan."¹

Apakah yang masih perlu dikata tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Yang jelas perkembangan bahasa Indonesia adalah buah perkembangan sejarah kebudayaan - termasuk di dalamnya sejarah politik - yang dapat dibanggakan. Ia mengungkapkan adanya daya kekuatan kebudayaan nasional. Mungkin memang masih perlu adanya suatu studi mengenai: mengapa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa nasional. Teori mengenai toleransi mayoritas - yaitu toleransi orang Jawa - adalah salah satu percobaan interpretasi yang terjadi kemudian. Memang tidak dapat diingkari bahwa di dalam proses tersebut tercermin aspek toleransi. Tetapi argumentasi ini, untuk tidak mengatakan kurang dapat diterima, tampaknya amat lemah. Tidakkah proses ini memang merupakan akibat dari perkembangan suatu substrat kultural nusantara, yang memang melandasi perkembangan masyarakat dan kebudayaan nusantara, bahkan mungkin lebih luas dari sekedar wilayah Indonesia ini? Dengan perkataan lain: bahasa nasional dapat terjadi, karena

1 Ibid.

dinamik kebudayaan nasional itu memang riil ada, dan mungkin mempunyai akar-akarnya di masa-masa yang jauh silam.

Masalah terpenting yang harus mendapat perhatian adalah masalah hubungan pengembangan bahasa Indonesia dengan situasi kultural bangsa Indonesia dewasa ini, hal mana sudah banyak kami ulas di muka, terutama berkenaan dengan proses transformasi ke arah peradaban, di dalam konteks fase akulturasi ketiga. Secara kultural diperlukan perkembangan kehidupan bangsa di mana dititikberatkan kerja keras, disiplin, ketelitian dan kecepatan, yang tentu ada hubungannya dengan pengembangan bahasa Indonesia sebagai manifestasi dan ekspresi dari kebudayaan nasional. Dengan perkataan lain: jalinan dialektik antara kebudayaan, politik dan bahasa yang terungkap di dalam Sumpah Pemuda beberapa tahun yang lalu, harus terlaksana pula di dalam kancah sejarah sekarang dan di masa mendatang.

Oleh karena kancah di masa mendatang bagi bangsa Indonesia adalah kancah mondial dan regional, maka masalah mengenai bahasa asing memang amat penting artinya. Ada dua pertimbangan mengapa bahasa asing menjadi suatu permasalahan yang harus kita pikirkan secara sungguh-sungguh. Pertama-tama bahasa adalah pintu perkembangan eksistensi manusia, baik dalam taraf individual maupun dalam taraf kolektif. Lewat pintu itulah perkembangan eksistensi dapat diperkaya. Kedua, wilayah Indonesia yang dengan sendirinya akan selalu mempunyai implikasi sosial politik, sosial ekonomi dan dengan sendirinya juga sosio kultural.

Di muka sudah dikemukakan bahwa kancah masa depan bangsa Indonesia adalah kancah mondial dan regional. Kita tidak dapat bersikap eskapistis dan memang tidak akan dapat melarikan diri dari perputaran sejarah besar umat manusia. Kita harus secara sadar dan berani memasuki perputaran roda tersebut. Tetapi untuk itu perlengkapan kita harus diperkuat. Dan salah satu perlengkapan adalah pintu-pintu lewat mana bangsa Indonesia akan dapat secara sadar dan berani memasuki perputaran roda sejarah umat manusia tersebut. Bahasa asing perlu kita lihat sebagai salah satu dari pintu-pintu itu.

Di sini masalahnya adalah menentukan bahasa asing manakah yang akan menjadi perlengkapan eksistensi bangsa kita di dalam konteks sejarah kebudayaan dunia dewasa ini. Kebanyakan kiranya cenderung untuk memilih bahasa Inggris sebagai pilihan utama. Permasalahan selanjutnya adalah: bagaimanakah cara membuat bahasa itu menjadi suatu perbekalan untuk masyarakat Indonesia. Di sini terdapat beberapa alternatif, sekurang-kurangnya ada dua kemungkinan. Pertama secara tegas-tegas mengharuskan penguasaan satu bahasa asing itu sebagai persyaratan untuk perkembangan kebudayaan, perkembangan peradaban, sehingga dengan demikian maka

masing-masing manusia Indonesia akan memperoleh bekal tersebut secara langsung dan aktif. Pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah: mungkinkah hal ini dicapai? Alternatif kedua adalah: bagi tingkat-tingkat tertentu, bahasa tersebut harus menjadi suatu keharusan mutlak. Akan tetapi bagi perkembangan kebudayaan dan peradaban bangsa secara luas dan merata, yang penting bukanlah penguasaan bahasa asing tersebut, melainkan bagaimana dapat menimba unsur-unsur yang baik dan memperkaya dari luar, sehingga permasalahannya menjadi bagaimanakah menterjemahkan khasanah kebudayaan dari luar itu untuk dapat dimanfaatkan oleh seluruh bangsa di seluruh tanah air kita ini. Namun demikian, oleh karena kancah masa depan Indonesia adalah kancah mondial dan regional, maka jelas sekali bahwa penguasaan bahasa asing utama itu harus merupakan kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar bagi kelompok-kelompok elite strategis di dalam pengembangan kebudayaan bangsa kita ini. Sebab penguasaan bahasa ini akan besar sekali artinya untuk menopang evolusi pilihan eksistensi kita sebagai bangsa, sebagai bagian dari perputaran roda sejarah umat manusia ini. Sebab fase akulturasi ketiga akan segera - dan sudah mulai - berjalani dengan fase akulturasi keempat: fase mondial dan fase regional.



LEMBU KEPOLISIAN